

## Strategi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tingkat SMP Kota Bandung (SMPN 37 dan 35 Kota Bandung)

Bisjarah Rahmadhani<sup>a</sup> dan Nefi Aris Ambar Asmara<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup>bisjarahmadhani@gmail.com, <sup>b</sup>nefi.arisambar@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SMP di Kota Bandung dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung sudah efektif karena dilaksanakan menggunakan strategi yang cukup baik dan tingkat pencairan dana yang dilakukan sudah mencapai 100 persen. Sedangkan implementasi di SMPN 35 Kota Bandung masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari dimensi implementing organization dalam teori kebijakan Adam Smith. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, salah satu kelemahan dalam kebijakan ini adalah belum adanya mekanisme penyeleksian penerima bantuan. Saran yang direkomendasikan peneliti yaitu: (1) memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SIPINTAR; (2) inisiasi untuk menerapkan infografis yang telah dibuat; (3) inisiasi untuk menerapkan model mekanisme penyeleksian; dan (4) mempertahankan strategi dari SMPN 37 yang telah dilakukan dan dapat menjadi contoh bagi SMP lainnya.

**Kata Kunci:** strategi, implementasi kebijakan, program indonesia pintar

### *Implementation Strategy Of The Smart Indonesia Program Policy Through The Indonesian Smart Card At The Junior High School Level In Bandung (Smpn 37 And Smpn 35 Bandung)*

#### *Abstract*

*This research uses a qualitative approach and aims to analyze the implementation of Smart Indonesia Program policy through Smart Indonesia Card at the junior high school level in Bandung and formulate strategies to improve the implementation of the program. The research method used is a qualitative approach. The results of the study are to prove that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMPN 37 Bandung City has been effective because the implementation of the strategy is quite good and the implementation of the funds carried out has reached 100 percent. While the implementation at SMPN 35 Bandung City is still not going well, it can be seen from the dimensions of the implementing organization in Adam Smith's policy theory. Based on the SWOT analysis conducted, one of the weaknesses in this policy is that there is no mechanism for selecting beneficiaries. The definite suggestions of researchers are: (1) maximizing the utilization of the SIPITAR application; (2) initiation to apply the created infographic; (3) initiation to apply the selection mechanism model;*

and (4) maintain the strategies that have been carried out by SMPN 37 that have been carried out and can serve as examples for other schools.

**Keywords:** strategy, policy implementation, indonesian smart program

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014. Program Indonesia Pintar (PIP) hadir melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan yang utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau masalah kemiskinan, sehingga siswa tidak memiliki biaya untuk meneruskan pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

Dilansir dari website Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-12 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Tujuan pemerintah mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu:

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan akses pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun;
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi; dan
- 3) Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah formal ataupun non-formal.

Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan dibawah 3 naungan kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang seterusnya akan dirasakan oleh masyarakat melalui Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya yang menjadi implementator secara langsung dalam melaksanakan penyaluran dana yaitu pihak sekolah (Agusman et al., 2019). Program ini pertama kali diterapkan pada tahun 2015 dan

jumlah penerima bantuan program ini mencapai 20,37 juta siswa tidak mampu dengan total anggaran mencapai Rp. 12,81 triliun. Bantuan ini diberikan 2 kali dalam satu tahun sesuai dengan

tahun ajaran sekolah.

Tabel Besaran Bantuan Dana Program Indonesia Pintar

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang langsung menerapkan kebijakan Program Indonesia Pintar sejak tahun 2015. Jumlah SMP yang sudah menerapkan kebijakan program ini sebanyak 64 SMP Negeri dan 180 SMP swasta. Dilihat dari data Dinas Pendidikan, total siswa penerima bantuan tingkat SMP yang terdaftar dalam SK pada tahun 2020 yaitu sebanyak 31.893 siswa dari total siswa tingkat SMP yaitu 99.386 siswa.

Meskipun secara konseptual Program Indonesia Pintar ini sebetulnya sudah cukup bagus dan jelas, termasuk tujuan kebijakan dan sasaran penerimanya (Miranti, dkk., 2016). Namun pada tahapan implementasinya masih terdapat permasalahan dan kendala yang menghambat kelancaran suksesnya penerapan Program Indonesia Pintar di Kota Bandung, yaitu:

1. Kurang tepatnya sasaran. Para penerima bantuan tidak dilakukan survey oleh pihak dinas pendidikan maupun pihak sekolah serta tidak adanya mekanisme penyeleksian untuk penerima bantuan. Sehingga rentan terjadi tidak tepat sasaran.
2. Kurangnya peran aktif sekolah. Pihak sekolah merupakan salah satu implementator yang berperan penting dalam suksesnya program ini. Keaktifan sekolah menjadi indikator penting dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar. Pihak sekolah diawasi oleh dinas pendidikan. Dinas pendidikan selalu memberikan informasi-informasi penting terkait pencairan dana program ini. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bandung, SMP yang memiliki predikat baik dalam pencairan dana PIP yaitu SMPN 37, hal tersebut dibuktikan dengan

pencairan dana yang sekolah tersebut lakukan selalu mencapai 100% yang artinya semua penerima bantuan sudah mencairkan dana bantuan yang diberikan. Sedangkan sekolah yang dinilai lambat dalam melakukan pencairan dana bantuan ini yaitu SMPN 35, dibuktikan dengan masih lambatnya pencairan dana dan kurangnya keaktifan sekolah, sehingga status pencairan dananya belum mencapai 100%.

3. Distribusi KIP yang kurang lancar, sehingga menyebabkan proses penyaluran dana yang lama. Proses pencairan dana dilakukan secara bertahap, mulai dari bulan Januari. Dana bantuan langsung disalurkan ke rekening siswa penerima bantuan. Selanjutnya pemberitahuan dapat diberitahukan dari dinas pendidikan kepada operator Program Indonesia Pintar di sekolah. Jika pihak sekolah tidak berperan aktif dalam memberikan informasi tersebut, maka penyaluran dan pencairan dana akan lama dan terhambat. Menurut website Program Indonesia Pintar, dana bantuan idealnya didistribusikan langsung pada awal semester yaitu semester genap pada bulan Januari dan semester ganjil pada bulan Juli. Tetapi, dikarenakan beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi kepada para penerima bantuan, distribusi bantuan menjadi kurang lancar dan terhambat beberapa bulan. Sehingga para penerima bantuan harus menunggu untuk memanfaatkan dana bantuan tersebut.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, untuk memastikan keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandung dapat dilihat dari implementasinya di lapangan, pemilihan sekolah yang dilakukan peneliti dilihat dari tingkat pencairan dananya, yaitu SMPN 37 dan SMPN 35 Kota Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dan merumuskan strategi dalam peningkatkan implementasinya.

## B. PEMBAHASAN

Aktor kebijakan yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar adalah Dinas Pendidikan dan operator dari pihak sekolah. Masing-masing dari aktor kebijakan tersebut memiliki perannya dalam menyukseskan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kota Bandung. Dalam menilai implementasi di

SMPN 37 dan SMPN 35, peneliti menggunakan teori kebijakan Adam Smith yang didalamnya terdapat 4 dimensi.

### a. Kebijakan yang diidealkan (Idealized Policy)

Kebijakan yang diidealkan ini menjelaskan tentang perumus kebijakan diharapkan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam mendorong kelompok sasaran dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di SMPN 37, tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ideal disosialisasikan kepada orang tua dan siswa serta melibatkan wali kelas sebagai perantara pemberian informasi. Tujuan kebijakan di SMPN 37 dan SMPN 35 sudah terpenuhi, yaitu aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Tetapi untuk tujuan 1 perlu diberikan perhatian karena aksesibilitas yang semakin mudah membuat siswa yang tidak mampu harus bersaing dengan siswa yang mampu. Hal tersebut menjadi perhatian pihak sekolah untuk melakukan filterisasi siswa yang mendaftar bantuan.

### b. Kelompok Sasaran (Target Groups)

Kelompok sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar adalah siswa yang masuk ke dalam salah satu kriteria penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 37 dan SMPN 35 memiliki perbedaan jumlah target groups yang sangat signifikan, yakni di SMPN 37 sebanyak 420 siswa sedangkan di SMPN 35 sebanyak 198 siswa. Meskipun SMPN 37 memiliki jumlah target groups yang lebih banyak, tetapi implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat pencairan dana yang dilakukan selalu mencapai 100 persen setiap tahunnya. Sedangkan untuk SMPN 35 dengan jumlah target groups yang lebih sedikit, tingkat pencairan dana yang dilakukan pada tahun 2020 masih menyentuh angka 82 persen, dimana jumlah siswa yang belum mencairkan mencapai 49 siswa (Data Dinas Pendidikan).

### c. Badan Pelaksana (Implementing Organizations)

Dimensi ini menilai badan-badan pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan dan

proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan badan pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa SDM yang mendukung lancarnya implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMPN 37 Kota Bandung hanya dikelola oleh 1 orang yaitu bertugas sebagai operator Program Indonesia Pintar. Sedangkan di SMPN 35 Kota Bandung dikelola oleh 3 orang, yaitu 1 orang dari Kesiswaan dan 2 orang bertugas sebagai operator. Meskipun di SMPN 37 Kota Bandung hanya dikelola oleh 1 orang, tetapi pengelola tersebut dapat menangani jumlah target groups yang lebih banyak dibandingkan dengan SMPN 35 Kota Bandung yang dikelola oleh 3 orang. Hal tersebut dikarenakan SMPN 37 Kota Bandung memiliki strategi yang cukup efektif dalam menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu dengan cara:

- Mengadakan sosialisasi dengan para penerima bantuan yang terdaftar dalam SK yang diberikan oleh dinas pendidikan untuk mengarahkan pencairan dana bantuan;
- Membagikan surat keterangan bahwa siswa tersebut merupakan siswa aktif di SMPN 37; dan
- Berkoordinasi dengan pihak bank penyalur yaitu Bank BRI KCP Kiaracondong.

Dengan strategi seperti yang dilakukan dapat mengatasi kendala yang dialami oleh pihak SMPN 37 Kota Bandung dalam pendistribusian bantuan.

#### d. Faktor Lingkungan (Environmental Factors)

Dimensi ini menilai terkait faktor lingkungan yang berpengaruh dalam suatu kebijakan. Selain faktor ekonomi yang berperan sangat penting dalam tercapainya tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), terdapat beberapa faktor lain. Faktor pendukung berhasilnya implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung adalah faktor soft skills yakni terkait kreativitas. Kreativitas yang dimiliki oleh operator pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung dapat menjadikan implementasi lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan SMPN 35 Kota Bandung. Sedangkan faktor yang menjadi ketidakberhasilan implementasi di SMPN 35 Kota Bandung adalah pihak orang tua yang susah dihubungi dan tidak kooperatif.

Dalam merumuskan strategi, peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai alat untuk mengelompokkan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal dan eksternal kebijakan Program Indonesia Pintar. Pengelompokkan

kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal dituangkan dalam gambar dibawah ini.

Internal	Eksternal
<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kebijakan yang mengatur Program Indonesia Pintar, sehingga SOP, tujuan dan sasaran kelompok sudah jelas;</li> <li>Meningkatkan akses bagi penerima manfaat untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat sekolah;</li> <li>Pengawasan dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah; dan</li> <li>Adanya strategi yang dilakukan pihak sekolah yaitu SMPN 37 Kota Bandung dalam menyukseskan program ini.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kolaborasi antara Kementerian Pendidikan (data Dapodik) dan Kementerian Sosial (DTKS);</li> <li>Koordinasi yang dilakukan pihak sekolah dengan bank penyalur;</li> <li>Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk menjangkau siswa tidak mampu yang tidak terdaftar dalam bantuan Program Indonesia Pintar; dan</li> <li>Bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan personal siswa tidak mampu.</li> </ol>
<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Ancaman (Threat)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya pemutakhiran data pada tahun 2018 yang menyebabkan beberapa siswa miskin penerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar pada data yang baru;</li> <li>Implementator yang kurang peduli karena tidak melakukan survey kepada para penerima bantuan;</li> <li>Meknisme seleksi kriteria penerima bantuan Program Indonesia Pintar belum memadai; dan</li> <li>Kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat kurang melakukan pengawasan;</li> <li>Beberapa orang tua siswa tidak mampu tidak tau cara untuk mendapatkan bantuan program ini;</li> <li>Rawan penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan Program Indonesia Pintar; dan</li> <li>Tidak semua siswa tidak mampu yang didaftarkan oleh operator PIP mendapat bantuan karena verifikasi dilakukan oleh dinas pendidikan.</li> </ol>

**Gambar Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal Kebijakan Program Indonesia Pintar tingkat SMP Kota Bandung (SMPN 37 dan 35 Kota Bandung)**

Setelah merumuskan indikator internal dan eksternal, langsung diberikan bobot untuk mengetahui nilai dari setiap indikator dalam tahapan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE). Skala bobot yang diberikan mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting).

Sedangkan rating diberikan berdasarkan tingkat pengaruh masing-masing faktor terhadap peningkatan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SMP di Kota Bandung, skala rating yang diberikan yaitu:

- 4 = mempunyai pengaruh yang sangat bagus terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- 3 = mempunyai pengaruh yang bagus terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar

### Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

- c. 2 = mempunyai pengaruh yang cukup terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- d. 1 = mempunyai pengaruh yang paling kecil terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar.

No.	Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor (BxR)
1	2	3	4	5
<b>Kekuatan (Strength)</b>				
1	Terdapat kebijakan yang mengatur Program Indonesia Pintar, sehingga SOP, tujuan dan sasaran kelompok sudah jelas	0,15	4	0,60
2	Meningkatkan akses bagi penerima manfaat untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat sekolah	0,15	4	0,60
3	Pegawasan dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah	0,05	3	0,15
4	Adanya strategi yang dilakukan pihak sekolah yaitu SMPN 37 Kota Bandung dalam menyelesaikan program ini.	0,15	4	0,60
<b>Jumlah Kekuatan (Strength)</b>		<b>0,50</b>		<b>1,95</b>
<b>Kelemahan (Weakness)</b>				
1	Terjadinya pemotakhiran data pada tahun 2018 yang menyebabkan beberapa siswa tidak menerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar pada data yang baru	0,15	2	0,30
2	Implementator yang kurang peduli karena tidak melakukan survey kepada para penerima bantuan	0,15	3	0,45
3	Mekanisme seleksi kriteria penerima bantuan Program Indonesia Pintar belum memadai	0,15	4	0,60
4	Kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah	0,05	2	0,10
<b>Jumlah Kelemahan (Weakness)</b>		<b>0,50</b>		<b>1,45</b>
<b>Jumlah Total (kekuatan dan kelemahan)</b>		<b>1,00</b>		

**Gambar Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)**

No.	Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor (BxR)
1	2	3	4	5
<b>Peluang (Opportunity)</b>				
1	Adanya kolaborasi antara Kementerian Pendidikan (data Depdik) dan Kementerian Sosial (DTKS)	0,15	2	0,30
2	Koordinasi yang dilakukan pihak sekolah dengan bank penyelenggara	0,10	2	0,20
3	Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk menjangkau siswa tidak mampu yang tidak terdaftar dalam bantuan Program Indonesia Pintar	0,10	3	0,30
4	Bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan personal siswa tidak mampu	0,20	4	0,80
<b>Jumlah Peluang (Opportunity)</b>		<b>0,55</b>		<b>1,60</b>
<b>Ancaman (Threat)</b>				
1	Masyarakat kurang melakukan pengawasan	0,10	2	0,20
2	Beberapa orang tua siswa tidak mampu tidak tau cara untuk mendapatkan bantuan program ini	0,05	2	0,10
3	Riswan penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan Program Indonesia Pintar	0,20	4	0,80
4	Tidak semua siswa tidak mampu yang terdaftar oleh operator PIP mendapat bantuan karena dilakukan verifikasi oleh dinas pendidikan	0,10	2	0,20
<b>Jumlah Ancaman (Threat)</b>		<b>0,45</b>		<b>1,30</b>
<b>Jumlah Total (peluang dan ancaman)</b>		<b>1,00</b>		

**Gambar Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)**

Setelah melakukan pemberian bobot dan rating terhadap indikator strength, weakness, opportunity dan threat, Tahapan selanjutnya adalah menyusun matriks KAFI dan KAFE untuk dilakukan analisis kuadran strategi dengan menggunakan diagram cartesius. KAFI digambarkan dengan sumbu mendatar X dan KAFE digambarkan dengan sumbu vertikal Y. penentuan titik pada diagram cartesius dilakukan dengan cara berikut:

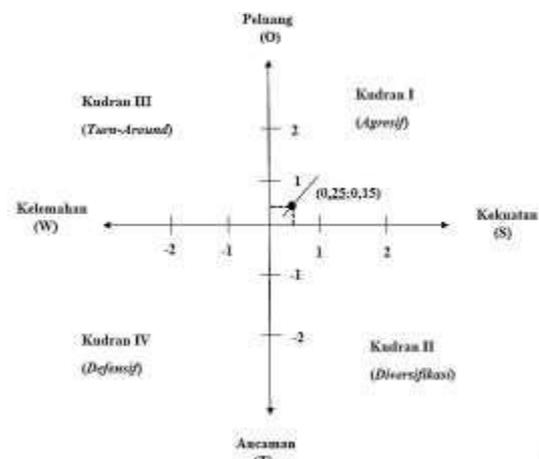
a. Rumus menentukan titik koordinat KAFI: Sumbu X =  $\frac{(\text{Skor Kekuatan} - \text{Skor Kelemahan})}{2}$

$$X = \frac{(1,95 - 1,45)}{2} = \frac{0,50}{2} = 0,25$$

b. Rumus menentukan titik koordinat KAFE: Sumbu Y =  $\frac{(\text{Skor Peluang} - \text{Skor Ancaman})}{2}$

$$Y = \frac{(1,60 - 1,30)}{2} = \frac{0,30}{2} = 0,15$$

Berdasarkan perhitungan titik koordinat KAFI dan KAFE diatas, maka titik koordinat kuadran strateginya adalah (0,25;0,15) yang artinya berada pada kuadran I (Agresif). Kuadran ini menggambarkan situasi yang menguntungkan, karena kekuatannya dapat memanfaatkan peluang yang ada. Berikut ini gambaran mengenai analisis kuadran strategi menggunakan diagram cartesius dalam gambar dibawah ini.



**Gambar Analisis Kuadran Strategi untuk Kebijakan Program Indonesia Pintar**

**Tingkat SMP di Kota Bandung dengan Menggunakan Diagram Cartesius**

**C. PENUTUP DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan pada hasil penelitian, implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dilihat dari 4 dimensi kebijakan Smith di SMPN 37 dapat dikatakan sudah berjalan cukup efektif dikarenakan adanya strategi yang mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung yang diciptakan melalui kreativitas SDM pengelola atau pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP). Sehingga tingkat pencairan dana mencapai 100 persen. Sedangkan implementasi di SMPN 35 belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan dilihat dari salah satu dimensi yaitu dimensi implementing organization berbicara terkait SDM pelaksana kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 35 Kota Bandung.

Dalam merumuskan strategi, peneliti menggunakan analisis SWOT dan hasil dari analisis menunjukkan nilai (0,25;0,15) yang berada pada kuadran I (Agresif). Melihat hal tersebut, terdapat rekomendasi strategi yang diajukan peneliti, yaitu:

1. Bagi SMPN 37 dan 35 Kota Bandung, dapat melaksanakan program ini mulai dari mengkomunikasikan sampai dengan pendistribusian berpedoman pada Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan Persekjen Kemendikbud No. 8 Tahun 2020;
2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPINTAR untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
3. Strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu SMPN 37 Kota Bandung harus tetap digunakan dan dioptimalkan. Bagi SMPN 35 Kota Bandung dapat mengadopsi strategi yang dilakukan SMPN 37 Kota Bandung agar implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat lebih efektif;
4. Melakukan mekanisme penyeleksian penerima bantuan lebih ketat lagi, karena dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber, mekanisme penyeleksian tersebut belum ada. Sehingga peneliti berniatif membuat perancangan model mekanisme penyeleksian penerima bantuan guna meningkatkan implementasi

kebijakan Program Indonesia Pintar di SMPN 37 dan SMPN 35 Kota Bandung.



Gambar Model Mekanisme Penyeleksian Penerima Bantuan

5. Inisiasi untuk menerapkan infografis Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah peneliti buat untuk memudahkan orang tua siswa dalam membaca kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).



**REFERENSI**

Agusman, Y.dkk. 2019. Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. Public

- Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 4(2). p 105-113.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2020. Kota Bandung Dalam Angka 2020. <http://bandungkota.bps.go.id/publikasi>
- Darmaningtyas. 2017. Problematik Kartu Indonesia Pintar. Tersedia di: <https://m.mediaindonesia.com/opini/115639/pr-oblematik-kartu-indonesia-pintar>
- Dinillah, M. 2017. PPDB untuk Siswa Tidak Mampu di SMP Favorit di Bandung Sepi Peminat. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3546465/ppdb-untuk-siswa-tidak-mampu-di-smp-favorit-di-bandung-sepi-peminat>
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Buku Saku Program Indonesia Pintar.
- Majid, Abd. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mirani, Dwi.dkk. 2016. Analysis of The Implementation of Smart Indonesian Program Through Indonesia Smart Card in Palembang City 2016. Asian Association for Public Administration Annual Conference (APPA). Vol 191.
- Muadi,S.dkk. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik. Vol. 06, p 195-224.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Sekjen Kemendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Program Indonesia Pintar. Tersedia di: <https://pip.kemendikbud.go.id>
- Rangkuti, F. 2013. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ren, Yishu. 2020. An Analysis on the Hindrances of the Implementation of the CTG Switching Policies in Rural Areas in Hebei Province: A Smith Policy-Implementing-Process Network. Open Journal of Science. Vol 08(08), p 14-25.
- Ren, Yishu. 2020. An Analysis on the Hindrances of the Implementation of the CTG Switching Policies in Rural Areas in Hebei Province: A Smith Policy-Implementing-Process Network. Open Journal of Science. Vol 08(08), p 14-25.
- Retnaningsih, H. 2017. Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial di Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Jurnal Aspirasi. Vol 8(2). p 161- 177.
- Rini, S.A. 2016. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Robinson, P. 2013. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Terj. Nia Paramita. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu, J. 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sartika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tahir, A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- The National Team For The Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). Smart Indonesia Card. <https://tpn2k.go.id/program/smart-indonesia-card>
- Viennet, Romane., Pont, Beatriz. 2017. Education Policy Implementation. OECD.